



---

## **Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama**

---

### **INFO PENULIS**

Tammam Sholahudin  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[g000220255@student.ums.ac.id](mailto:g000220255@student.ums.ac.id)

Muh. Nur Rochim Maksum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[mnr127@ums.ac.id](mailto:mnr127@ums.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Sholahudin, T., & Maksum, M. N. R. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 672-682.

### **Abstrak**

Pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada ormas keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), efektif mulai 30 Mei 2024, memunculkan berbagai implikasi sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan konsesi tambang terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat, serta mengevaluasi konsistensi kebijakan tersebut dengan nilai-nilai agama dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini akan menilai bagaimana konsesi tambang mempengaruhi relasi kelas sosial, kemungkinan eksploitasi tenaga kerja, serta dampak lingkungan yang mungkin timbul. Teori Marxisme digunakan untuk memahami potensi konflik kelas yang mungkin terjadi antara pemilik tambang dan pekerja, sedangkan teori hegemoni kultural Gramsci akan membantu menjelaskan bagaimana dominasi budaya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan tambang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk NU dan pihak terkait dalam memastikan bahwa kegiatan tambang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keselarasan dengan nilai-nilai agama yang dianut.

**Kata Kunci:** Nahdlatul Ulama, Tambang, Marxisme, Struktur Sosial dan Ekonomi.

### Abstract

The grant of mining concessions by the government to religious organizations, specifically Nahdlatul Ulama (NU), became effective starting May 30, 2024, raising various social and economic implications. This study aims to analyze the impact of the mining concession policy on the social and economic structure of communities and to evaluate the consistency of this policy with religious values and environmental sustainability. Using a qualitative approach through literature review, this research will assess how mining concessions affect social class relations, the potential exploitation of labor, and the environmental consequences that may arise. Marxist theory will be employed to understand potential class conflicts between mine owners and workers, while Gramsci's theory of cultural hegemony will help explain how cultural dominance might influence public perception of mining activities. This study is expected to provide useful recommendations for NU and related stakeholders to ensure that mining activities are conducted with consideration for long-term environmental impacts, community welfare, and alignment with the religious values upheld.

**Key Words:** Nahdlatul Ulama, Mining, Marxism, Social and Economic Structure.

### A. Pendahuluan

Pemerintah secara resmi memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 30 Mei 2024, sesuai dengan penetapan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (REPUBLIK INDONESIA, 2024). Melalui peraturan ini, Jokowi memberikan kewenangan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang.

Menurut Pranadji, organisasi masyarakat (Ormas) merupakan bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, kemitraan, swadaya, dan partisipasi publik. Ormas berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan kepedulian sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai isu publik. Kegiatan Ormas sering berkisar pada masalah-masalah seperti kemiskinan, hak-hak sipil dan politik, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, dan konflik sosial. Isu-isu tersebut menjadi fokus utama yang secara rutin ditangani oleh Ormas (Sulthan Alfaraby & Syafrina Sari Lubis, 2022).

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Republik Indonesia, 2019).

Sederhananya, Ormas adalah payung kegiatan sosial kemasyarakatan (KEMENKUMHAM, 2016) yang memiliki tujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat yang baik adalah yang aktif terlibat dalam mewujudkan tujuan negara (Arroisi et al., 2020). Dapat disimpulkan ormas keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan memperkuat dasar-dasar persatuan dan kesatuan bangsa berdasar pedoman agama.

Termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsesi bermakna izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan lain-lain. Dengan demikian pemberian konsesi tambang untuk ormas bisa diartikan sebagai pemberian izin bagi ormas keagamaan untuk membuka lahan tambang.

Dilain sisi kedekatan ormas Nahdlatul Ulama (NU) dengan pemerintahan Presiden Jokowi membawa berbagai keuntungan strategis bagi organisasi tersebut. Hubungan yang erat ini memberikan NU rasa tenang dan kepercayaan diri yang semakin kuat, memungkinkan organisasi tersebut memainkan peran yang lebih signifikan dalam berbagai sektor. Banyak elite senior NU yang kini menduduki posisi strategis di birokrasi, korporasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Sakti Hidayatullah et al., 2022). Pemberian konsesi tambang ini dianggap

sebagai bentuk balas budi Presiden Jokowi kepada NU atas dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu bulan Februari lalu.

Tentu saja pemberian WIUPK akan menimbulkan stigma buruk terhadap Organisasi Massa berbasis agama seperti NU, dikarenakan pandangan masyarakat terhadap aktivitas tambang masihlah tabu (Dondo et al., 2021) tetapi pemberian konsesi ini juga bisa menjadikan bisnis pertambangan lebih bersifat profetik mengingat baginda Nabi Muhammad juga menjalankan bisnis di usia 12 tahun (Saifullah, 2011).

Tak bisa dipungkiri, kasus ini bisa meluas dan menimbulkan sebuah ketegangan yang berujung pada konflik yang berkepanjangan, Menurut Soekanto dan Sulistyowati (Mas'udi, 2015), konflik bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya. Konflik dapat terjadi antara individu dan kelompok atau antara kelompok-kelompok. Sebagai ilustrasi, Soekanto dan Sulistyowati menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kolektif. Semua aktivitas didorong oleh kepentingan bersama. Meskipun kepentingan pribadi diakui, ia tetap memiliki peran sosial. Konflik antara kepentingan individu dan kelompok sering terjadi dan dalam beberapa kasus, hal ini bisa memicu perubahan.

Kembali mengingat tujuan berdirinya ormas Nahdlatul Ulama adalah menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2021), bahkan Nahdlatul Ulama sebagai ormas bukan hanya mempunyai spirit keagamaan, pemikiran, dan nasionalisme belaka tetapi memiliki pilar ekonomi dalam berdirinya NU 1926 (Sutisna, 2019). Pemberian konsesi tambang ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini, apakah akan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat ataukah malah hanya menjadi sebuah dampak negatif berupa kerusakan di muka bumi seperti disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41.

Tulisan ini menjelaskan tentang pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan Nahdlatul Ulama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pemberian konsesi tambang terhadap ormas keagamaan tersebut.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif dalam memperoleh data penelitian. peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisir sumber-sumber dari artikel, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas dampak sosial dan ekonomi kegiatan tambang, atau disebut studi kepustakaan (Library Research) (Mahanum, 2021). Jenis penelitian ini berfokus pada kajian literatur (literature review), yaitu proses menelaah atau mengevaluasi kembali berbagai sumber literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain terkait dengan topik yang sedang diteliti (Mahanum, 2021), yang dalam kasus ini adalah pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosial-ekonomi, metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks, gambar, atau karya monumental dari berbagai sumber. Data primer dari penelitian ini adalah konferensi pers dari ketua umum dari PBNU dan sumber sekunder berasal dari jurnal beserta buku, sumber-sumber tersebut menjadi dasar analisis. Untuk menjamin kredibilitas, peneliti meningkatkan ketekunan dalam menciptakan karya. Analisis data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman. Teknik analisis ini mencakup tiga tahap: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sri Annisa & Mailani, 2023).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang 3 hal utama, yaitu: hasil temuan kasus lapangan berupa pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatu Ulama dan analisis dampak sosial dan ekonomi. Pembahasan akan menggunakan teori kelas, teori konflik, dan teori kesadaran kelas Karl Marx. Selain itu, teori hegemoni Antonio Gramsci juga digunakan.

### **Konsesi Tambang kepada Nahdlatul Ulama**

Dilansir dari tempo.co ketua umum PBNU Gus Yaqut Qolil Qoumas menyatakan rasa terimakasih kepada pemerintah karena telah memberikan konsesi tambang terhadap

pemerintah. Ia menimbang bahwa Nahdlatul Ulama butuh tambang itu "Kami melihat sebagai peluang, ya, segera kami tangkap. Wong butuh, mau bagaimana lagi," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.

Nadlatul Ulama menerima tambang itu karena merasa butuh untuk pembiayaan operasional program dan infrastruktur, "Pertama-tama saya katakan, NU ini butuh, apapun yang halal, yang bisa menjadi sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi," lanjut Gus Yahya. Ia menambahkan bahwa mayoritas program Nahdlatul Ulama dikelola oleh komunitas nahdliyin (warga NU), namun sumber daya dan kapasitas mereka tidak lagi mampu menopang berbagai program tersebut, termasuk sekitar 30 ribu pesantren dan madrasah yang dimiliki oleh nahdliyin.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Bahlil dalam Konferensi Pers, Jumat, 7 Juni 2024 menyampaikan bahwasannya untuk pengolahan tambang bukan dikelola oleh Nadlatul Ulama secara langsung, tetapi akan dikelola oleh badan usaha. Ini berarti nahdlatul Ulama akan memiliki Badan Usaha khusus yang akan mengelola tambang hasil pemberian pemerintah secara professional.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha pertambangan adalah berbagai tahapan kegiatan, termasuk penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi mineral dan batubara. Proses ini melibatkan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta aktivitas pasca tambang (Pemerintah RI, 2009). Jika Nahdlatul Ulama mendapat konsesi tambang dan sudah melakukan kegiatan tambang maka akan kita olah data kemungkinan tersebut dengan pisau analisis teori karl marx.

Berdasarkan data yang diperoleh, analisis akan dilakukan menggunakan Teori Kelas, yang juga dikenal sebagai Marxisme, pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx pada abad ke-19. Sebelum berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur pada awal 1980-an, ajaran Karl Marx telah mempengaruhi hampir setengah dari negara-negara di dunia. (Abidin, 2011).

Marx membagi masyarakat menjadi 2 kelas, Pertama, kelas atas adalah kelompok yang memiliki alat-alat produksi, seperti pabrik, mesin, dan tanah. Prinsip utama mereka adalah menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Contoh dari kelas ini adalah kaum borjuis atau kapitalis (Tualeka, 2017), Seperti halnya para aristokrat yang memiliki tanah, kelas bawah terdiri dari individu yang bekerja untuk pemilik alat-alat produksi. Sebagian besar dari kelas ini adalah buruh atau pekerja, termasuk petani yang mengolah tanah milik aristokrat. (Hendriwani, 2022).

**Tabel 1.** Hasil Telaah Kasus

<b>Kasus/Kelas</b>	<b>Kelas Atas</b>	<b>Kelas Bawah</b>
Kasus Karl Marx.	Borjuis, Bangsawan, Pemilik Modal, Tuan Tanah, Pemilik Tambang.	Proletar, Petani, Karyawan.
Kasus Konsesi Tambang kepada ormas keagamaan di Indonesia.	Nahdlatul Ulama	Para pekerja yang bekerja di tambang milik Nahdlatul Ulama

Setelah masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas berdasarkan hubungan mereka dengan alat produksi, maka akan rawan terjadi eksploitasi (Fadillah Ahdi, 2023). Disebut eksploitatif karena kaum borjuis membeli tenaga kaum proletar dengan harga yang tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. Meskipun sebenarnya kaum proletar yang menjual jasa, keuntungan justru dinikmati oleh kaum borjuis (Hendriwani, 2022).

### **Dampak Sosial dan Ekonomi**

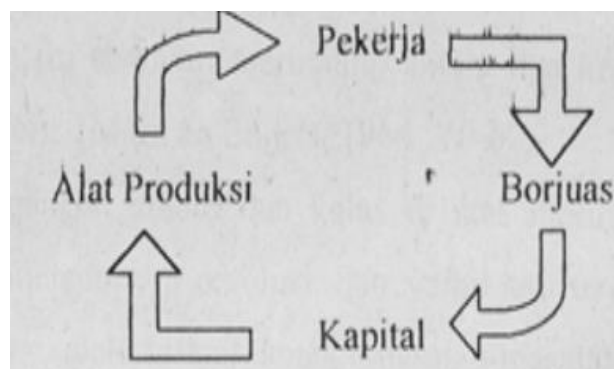
Kegiatan Pertambangan memiliki dampak sosial berupa terbaginya masyarakat menjadi 2 kelas, yaitu borjuis dan proletar. Dari 2 kelas tersebut secara alamiah dapat terjadi konflik (Salapudin, 2023), yang merupakan bentuk dari pertentangan kelas. Pertentangan kelas ini muncul akibat konflik ekonomi, terutama dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya

yang terbatas atau perbedaan kepentingan antar kelas, yang pada akhirnya menyebabkan konflik sosial (Muhammad Rauda Agus Udaya Munarfa et al., 2024).

Marx mengembangkan teori konflik sosial dengan mengaitkan berbagai konsep seperti perubahan sosial, kekuasaan, dan peran negara, selain dari kelas sosial. Menurut Marx, negara memiliki kepentingan tertentu yang sering dimanfaatkan oleh kelas borjuis. Kelas borjuis, yang mengendalikan alat-alat produksi, membutuhkan legalisasi dan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya. (Paul Johnson, 1981). Seiring berjalannya waktu, kelas borjuis terus memperluas pasar. Mereka dapat mengendalikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat karena semakin memperkuat pengaruh mereka atas alat-alat industri modern. Selain itu, kelas borjuis juga akan mengatur dinamika pasar dan bahkan mengontrol berbagai kebijakan politik yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi mereka. (Marx & Engels, 1955).

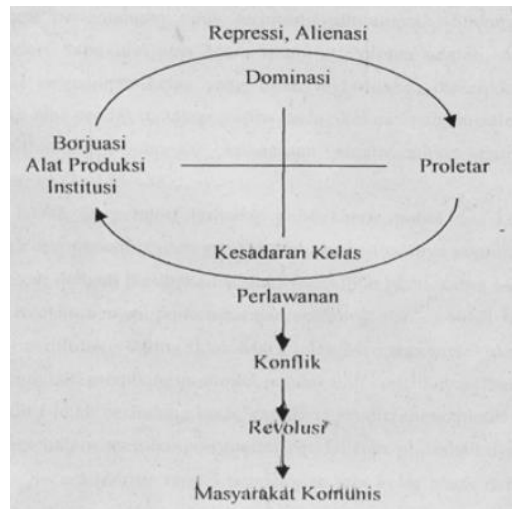
Bagi kelas borjuis, kepentingan utama mereka adalah mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya. Perlu digaris bawahi bahwa menurut Marx, motif pengumpulan kekayaan ini tidak hanya didorong oleh keserakahan kelas borjuis, tetapi juga karena mereka dihadapkan pada tuntutan untuk mencapai target keuntungan sebagai konsekuensi logis dari persaingan di pasar bebas (Muhammad Rauda Agus Udaya Munarfa et al., 2024). Oleh karena itu, kelas borjuis dengan sengaja mengeksploitasi tenaga kerja dari kelas proletar sebagai akibat logis dari tuntutan persaingan tersebut. Mereka memperoleh tenaga kerja dengan biaya serendah mungkin dan kemudian memaksimalkan eksploitasi terhadapnya.

Di sisi lain, hubungan dalam kapitalisme menciptakan siklus ketergantungan antara berbagai kelas dengan kepentingan berbeda, di mana kelas pekerja rendah memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi. Dalam beberapa konteks lokal di luar Barat, terkadang ditemukan bahwa pekerja "bersedia" menerima upah di bawah standar minimum karena sulitnya menemukan pekerjaan lain. (Syadzali, 2014).



**Gambar 1.** Sumber (Syadzali, 2014).

Sebagai kelompok yang tertindas, para pekerja menyadari pentingnya upaya untuk memperbaiki kondisi mereka. Prinsip bersama untuk bebas dari eksploitasi oleh kelas borjuis menimbulkan kesadaran kolektif. Namun, kesadaran kelas pekerja (proletar) tidak muncul secara otomatis. Menurut Marx, kesadaran ini terbentuk melalui perjuangan individu melawan borjuis, yang kemudian diikuti oleh konsolidasi di antara seluruh pekerja. Setelah mencapai kesepakatan bersama, mereka memulai perlawanan terhadap borjuis. Perlawanan ini sering diekspresikan melalui tindakan fisik, seperti merusak alat produksi dan barang impor. Pada tahap ini, menurut Marx, para pekerja masih tersebar dan kekuatannya terpecah karena rivalitas internal. Tahap berikutnya adalah kesadaran untuk bersatu, seiring bertambahnya jumlah pekerja yang terkonsentrasi menjadi kekuatan besar. Bibit konflik mulai muncul dengan kerusuhan, memperuncing pertentangan antara dua kelas yang berseteru (Marx & Engels, 1955).



Gambar 2. Sumber (Syadzali, 2014).

Dalam sistem kapitalis, manusia tidak memiliki kebebasan dan universalitas dalam bekerja, melainkan terpaksa melakukannya sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Selain itu, para pekerja juga harus melayani mesin yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan mereka. Tugas utama pekerja adalah meningkatkan produksi. Dalam sistem ini (kapitalis) terdapat juga hubungan dengan sistem hukum antara pekerja, pemilik modal, dan penguasa. Kemajuan teknologi membuat mesin menjadi alat produksi yang lebih efisien dibandingkan produktivitas manusia. Akibatnya, posisi pekerja semakin tertekan dan upah mereka terancam menurun. Sistem hukum seharusnya diubah untuk mendukung pekerja agar kesejahteraan mereka dapat terwujud. Namun, dalam kenyataannya, di tengah masyarakat industri, pekerja selalu berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. (Abdillah et al., 2021). Ketidaksiharian antara esensi kemanusiaan dan pekerjaan tersebut dikenal sebagai alienasi (Hendrawan, 2017).

Salah satu tujuan Marx adalah terciptanya negara utopis (Magnis Suseno, 1999) bersistem komunis di masa depan, dunia tidak akan lagi dianggap statis, tetapi akan mengalami perubahan terus-menerus (Ismail et al., 2012). Tujuan utama dari kegunaan dalam komunisme adalah mengalihkan fokus dari kepentingan pribadi ke kepentingan sosial. Menurut Marx dan Engels, komunisme melibatkan kepemilikan sosial dan memperkenalkan sistem demokrasi baru melalui komunitas atau organisasi. Dengan organisasi ini, Marx dapat menggambarkan aspirasi manusia yang bebas dari konflik kelas dan dominasi politik. Sebagai hasilnya, demokrasi borjuis akan dibatasi oleh organisasi baru yang lebih demokratis dan realistis karena hanya akan berurusan dengan pengelolaan barang-barang, bukan masyarakat. (Ismail et al., 2012).

Untuk memicu konflik sehingga terjadi revolusi dan muncul negara yang utopis tersebut dibutuhkan kesadaran kelas, Kesadaran kelas merupakan aspek dari teori Marxis yang merujuk pada kesadaran individu tentang kelas sosialnya, kemampuan untuk bertindak demi kepentingan rasionalnya sendiri, atau sejauh mana seseorang menyadari tugas-tugas historis kelasnya (atau kesetiaan kelas) (Valentine et al., 2023). Kesadaran kelas muncul di kalangan pekerja yang menyadari posisi sosial mereka dan mulai bertindak untuk mengubah pola pikir mereka, setelah menyadari bahwa kehidupan material mereka dikendalikan oleh para pemilik modal (Wati, 2019).

Dalam pemikirannya Marx memiliki satu teori yang mengagalkan terjadinya sebuah negara utopis tersebut, ia menyebutnya sebagai kesadaran palsu (false consciousness), yaitu sebuah ilusi kesadaran yang mengekang manusia dari kebebasan secara kongkret. Ini mirip dengan ideologi yang tampaknya mencerminkan kebenaran, tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Karena kaum proletar tidak menyadari bahwa kesulitan dan penindasan yang mereka alami disebabkan oleh sistem kapitalis, mereka diberi bentuk agama untuk menjaga ketidaksiharian mereka dan terus terjebak dalam kondisi tersebut. (Maulidia, 2019). Salah satu penyebab kesadaran palsu adalah agama.

Menurut Marx, ada beberapa alasan mengapa agama bisa mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat akibat tekanan hidup. Pertama, agama menawarkan janji kebahagiaan abadi

di surga setelah kematian. Kedua, beberapa agama memberikan makna positif pada penderitaan yang disebabkan oleh penindasan dan tekanan dari kaum kapitalis terhadap pekerja, contohnya dengan mengajarkan kesabaran dan penerimaan sebagai bagian dari takdir Tuhan. Ketiga, agama menawarkan harapan akan intervensi supranatural untuk menyelesaikan masalah di dunia. Keempat, agama selalu membenarkan aturan sosial dan posisi seseorang di dalamnya (Maulidia, 2019). Menurut Marx, agama tidak membantu manusia keluar dari situasi penindasan, tetapi malah memperkuatnya (Valerian, 2021) dan dapat melemahkan perlawanan terhadap penindasan dan upaya untuk keluar dari kemiskinan tersebut (Haan & Takene, 2021).

Dalam konteks pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama (NU), pandangan Marx tentang kelas, konflik, kesadaran kelas, dan kesadaran palsu dapat diterapkan untuk menganalisis situasi tersebut. Pertama-tama, Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan yang menerima konsesi tambang menempatkannya dalam kelas atas dalam perspektif Marx, karena mereka menjadi pemilik tambang dan memiliki kontrol atas alat produksi tersebut. Di sisi lain, pekerja yang bekerja di tambang milik Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari kelas bawah, yaitu proletar, yang secara historis dieksploitasi oleh kelas atas, dalam hal ini Nahdlatul Ulama sebagai pemilik tambang.

Konflik antara kelas atas (Nahdlatul Ulama) dan kelas bawah (pekerja tambang) dapat dilihat dalam dinamika hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Pekerja tambang mungkin mengalami eksploitasi dan ketidakadilan dalam lingkungan kerja mereka, sebagaimana dipahami dalam teori konflik Marx tentang pertentangan antara kelas-kelas sosial.

Kesadaran kelas pekerja (proletar) dapat menjadi kunci dalam memahami respons terhadap situasi ini. Namun, kesadaran ini dapat dibayangi oleh kesadaran palsu yang diciptakan oleh agama, seperti yang dijelaskan oleh Marx. Nahdlatul Ulama, menggunakan agama sebagai pembenaran, mungkin mengajukan alasan-alasan agama untuk melanjutkan eksploitasi sumber daya alam dan pekerja tambangnya. Hal ini bisa menghambat upaya pekerja untuk melawan penindasan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Dalam konteks pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama, terlihat bagaimana agama digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelas atas (Nahdlatul Ulama sebagai pemilik tambang) dan melindungi status quo yang menguntungkan mereka, sementara juga menekan perlawanan dan kesadaran kelas pekerja (pekerja tambang) yang mungkin berusaha melawan penindasan dan eksploitasi mereka.

Tambang, dengan segala potensi ekonominya, sering kali memberikan keuntungan bagi para pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pekerja sering tidak sebanding dengan apa yang dinikmati oleh kaum kelas atas atau pemilik modal. Meskipun para pekerja mungkin mendapatkan penghasilan yang cukup dari pekerjaan tambang, keuntungan yang sebenarnya cenderung mengalir ke tangan kaum kelas atas, yang memiliki kontrol penuh atas sumber daya dan alat produksi.

Tidak hanya itu, kegiatan tambang juga seringkali memiliki dampak yang merusak terhadap lingkungan alam. Penambangan dapat menyebabkan kerusakan ekologi yang serius, termasuk penebangan hutan, kerusakan lahan, dan polusi lingkungan. Ini bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai moral yang ditemukan dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam. Dalam konteks Islam, Al Quran secara tegas melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Spirit Al Quran menekankan pentingnya menjaga alam dan lingkungan hidup sebagai amanah yang diberikan kepada manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan Dia menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi." Ini menunjukkan tanggung jawab manusia untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan alam, bukan merusaknya.

Dalam konteks teori hegemoni kultural Antonio Gramsci (Siswati, 2018), pemberian nilai ekonomi kepada pekerja dalam tambang sering kali diiringi dengan dominasi budaya yang diterapkan oleh kaum kelas atas atau pemilik modal. Konsep hegemoni kultural Gramsci mengacu pada dominasi kelompok atau kelas yang lebih kuat dalam masyarakat untuk mempengaruhi dan mengendalikan pandangan, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks pertambangan, kaum kelas atas atau pemilik modal dapat menggunakan kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk mempengaruhi persepsi dan keyakinan pekerja serta masyarakat umum tentang kebutuhan dan manfaat dari kegiatan pertambangan. Mereka

dapat menggunakan media, pendidikan, dan institusi lainnya untuk mempromosikan naratif yang mendukung kegiatan tambang, sementara meredam atau menekan suara-suara yang memperjuangkan perlindungan lingkungan atau hak-hak pekerja.

Dengan demikian, meskipun ada potensi ekonomi bagi pekerja dalam tambang, dominasi budaya yang diterapkan oleh kaum kelas atas dapat menghasilkan kesenjangan kekuatan yang signifikan antara mereka dan pekerja. Ini mengarah pada pembenaran atas praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti penambangan yang tidak berkelanjutan, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika lingkungan.

Dalam konteks Islam, hal ini juga bisa berarti bahwa pandangan yang mendukung perlindungan lingkungan dan keberlanjutan mungkin terpinggirkan atau diabaikan dalam hegemoni budaya yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik kaum kelas atas. Oleh karena itu, dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ajaran agama, penting untuk mempertimbangkan pengaruh hegemoni budaya dan memastikan bahwa nilai-nilai moral yang dianut oleh agama, termasuk Islam, tidak dikompromikan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih kuat dalam masyarakat. Ajaran Islam bertujuan untuk menjadikan pribadi sebagai manusia yang terbaik (insan kamil) yang memberikan manfaat bagi sesama (Rahmatullah et al., 2022), sehingga prinsip-prinsip agama harus diterapkan dengan memperhatikan kepentingan bersama dan kesejahteraan lingkungan.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama memunculkan sejumlah isu kompleks yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan budaya. Pada satu sisi, kegiatan tambang memberikan nilai ekonomi bagi pekerja, namun pada sisi lainnya, tambang juga dapat merusak lingkungan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mendorong untuk menjaga bumi.

Dalam konteks teori Marx tentang kelas, konflik, dan kesadaran, pemberian konsesi tambang membawa Nahdlatul Ulama ke dalam posisi kelas atas sebagai pemilik tambang, sementara pekerja tambang menjadi bagian dari kelas bawah yang rentan terhadap eksploitasi. Isu konflik dan kesadaran kelas muncul ketika pekerja mungkin mengalami eksploitasi dan kesenjangan ekonomi, sementara kesadaran kolektif mereka dapat dipengaruhi oleh kesadaran palsu yang diperkenalkan oleh agama untuk membenarkan praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Dengan mempertimbangkan teori hegemoni kultural Antonio Gramsci, perlu disadari bahwa pemberian konsesi tambang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga dominasi budaya yang mungkin mempengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat tentang pentingnya kegiatan tambang.

Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul, Nahdlatul Ulama disarankan untuk tidak terburu-buru dalam membuka tambang. Sebaliknya, mereka perlu melakukan kajian mendalam secara komprehensif terlebih dahulu. Kajian ini harus meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya secara menyeluruh. Penting bagi Nahdlatul Ulama untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan tambang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memastikan bahwa semua praktik yang diterapkan selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Selain itu, Nahdlatul Ulama sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, termasuk ahli lingkungan, masyarakat setempat, dan organisasi non-pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Nahdlatul Ulama dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan sifat-sifat manusia yang sering kali membawa mereka ke dalam kesalahan, ketidaktahuan dan ketergesaan dapat memperburuk situasi. Tanpa usaha untuk mencari ilmu dari Allah, manusia cenderung jatuh dalam kebodohan, yang meningkatkan risiko mereka melakukan kesalahan. Orang yang bodoh mudah melakukan ketidakadilan (Mukowim et al., 2024), baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dan yang paling sulit adalah bersikap tidak adil terhadap Tuhan. Ketergesaan juga seringkali menyebabkan manusia ingin mencapai

tujuan mereka dengan cepat tanpa mau bersusah payah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kesalahan yang tidak diinginkan (Mukowim et al., 2024).

## E. Referensi

- Abdillah, A., Oka Prastio, L., & Nur Effendi, S. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia. *Jurnal Identitas*, 1(2), 48–61. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>
- Abidin, Z. (2011). Pengantar Filsafat Barat. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). PT Rajagrafindo Persada. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Arroisi, J., Perdana, M. P., & Utama, R. (2020). Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.223>
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jap*, 7(101), 63–72.
- Fadillah Ahdi, N. (2023). *Memahami Teori Sosial Karl Marx: Kelas, Konflik, dan Perubahan*. 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Haan, A. E. M. de, & Takene, A. C. (2021). MEMAHAMI KONSEP KARL MARX &quot;AGAMA ADALAH CANDU MASYARAKAT&quot; DALAM PERILAKU BERIBADAH JEMAAT SEMAU UTARA, KLASIS SEMAU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1596–1609. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5305>
- Hendrawan, D. (2017). Alienasi Pekerja Pada Masyarakat Kapitalis Menurut Karl Marx. *Jurnal Filsafat*, 6(1), 13–33.
- Hendriwani, S. (2022). Teori Kelas Sosial Dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 2(01), 13–28. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26617>
- Ismail, I., Zuhaili, M., & Basir, K. (2012). Karl Marx Dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial (Karl Marx and the Concept of Social Class Struggle). *International Journal of Islamic Thought*, 1, 27–33. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SSRN-id2335859.pdf>
- KEMENKUMHAM. (2016). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 30.
- Magnis Suseno, F. (1999). *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (1st ed.). Gramedia.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Marx, K., & Engels, F. (1955). *The Communist Manifesto*. 1-46 Retrieved on April 15 2021. <https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Marx-CommunistManifesto.pdf>
- Mas'udi. (2015). AKAR-AKAR TEORI KONFLIK: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam. *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(1), 177–200.
- Maulidia, H. (2019). Relasi Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Emile Durkheim dan Karl Marx. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(2), 183–200. <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.17506>
- Muhammad Rauda Agus Udaya Munarfa, L. O., Aris, M., Prayogi, A., Amin, H., Tenri, A., Muak Hara, K., Sari, K., Tesaannisa, Abdul Munafi, L. O., & Rohmiati Mandati, W. O. (2024). TEORI SOSIOLOGI. In *EUREKA MEDIA AKSARA*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Mukowim, Maksun, M. N. R., Azani, M. Z., & Ali, M. (2024). *Prevention of Verbal Bullying*

- Through Education on Ethics Toward Fault.* Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9\\_55](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_55)
- Paul Johnson, D. (1981). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (1st ed.). Gramedia.
- Pemerintah RI. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 4.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2021). *PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA AD & ART NAHDLATUL ULAMA Keputusan Mukhtamar ke-34 NU di Lampung*.
- Rahmatullah, A., Hidayat, S., & Maksum, M. N. R. (2022). The Urgence of Values in Islamic Education (Syed Muhammad Naquib al-Attas Thought Study). *Tsaqafah*, 18(2), 315. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8249>
- Republik Indonesia. (2019). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN* (Issue 42).
- REPUBLIK INDONESIA. (2024). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. In *Rencana Umum Energi Nasional* (Issue 73).
- Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah Muhammad Saifullah ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PRAKTEK BISNIS RASULULLAH. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sakti Hidayatullah, A., Chumeidi, A., Fadli, Y., Dwiyanto Nurlukman, A., Author, C., Studi Ilmu Pemerintahan, P., & Muhammadiyah Tangerang, U. (2022). Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 197–206. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504>
- Salapudin, M. (2023). Perselisihan Tasawuf Di Nusantara: Perspektif Teori Konflik Karl Marx Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 5(2), 189–212. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijitpDOI:http://dx.doi.org/10.24042/ijitp.v5i2.19809>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci [The Anatomy of Antonio Gramsci's Theory of Hegemony]. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Sri Annisa, I., & Mailani, E. (2023). Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6469–6477. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AAalisis>
- Sulthan Alfaraby, M., & Syafrina Sari Lubis. (2022). Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Melakukan Pencegahan Dampak Covid-19 di Masyarakat. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 241–248. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v2i2.894>
- Sutisna, D. (2019). Komunikasi Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.4961>
- Syadzali, A. (2014). Konflik Kelas Dan Fenomena Komunisme Dalam Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 26–36. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i1.387>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Valentine, E., Muhamad, M. N., Ikhsan, M., & Hakim, N. (2023). Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx. *Das Sollen*, 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Valerian, H. F. (2021). Melihat Kembali Dinamika Kritik Agama Menurut Karl Marx. *Jurnal Marturia*, III(1), 1–20. <https://jurnal.stakmarturia.ac.id/umum/article/view/17%0Ahttps://jurnal.stakm>

[arturia.ac.id/umum/article/download/17/12](http://arturia.ac.id/umum/article/download/17/12)

Wati, A. R. (2019). Ideologi Kesadaran Kelas dalam Novel Cinta untuk Perempuan dengan Bulir-Bulir Cahaya di Wajahnya Karya Sayfullah Kajian Marxisme. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 11(2), 10.  
<https://doi.org/10.30651/st.v11i2.2353>